



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Snapshot Daya Saing Indonesia Dalam Memasuki Era ASEAN Economic Community (AEC)

Haedar Akib

Guru Besar dan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana (PPS) Universitas Negeri Makassar (UNM)

e-mail: haedar652002@yahoo.com.au

Hamdan

Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Biak Numford

e-mail: hamdaniisip@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi dimaknai oleh para pakar manajemen strategik sebagai era *hypercompetition* karena setiap negara dituntut memiliki kemampuan daya saing secara berkelanjutan. Globalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan, baik bagi institusi maupun individu yang terlibat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan *snapshot* (potret sesaat) daya saing Indonesia dalam memasuki era *ASEAN Economic Community* (AEC). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder dianalisis secara deskriptif-kuantitatif. Hasilnya adalah *snapshot* daya saing nasional dan daerah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Kawasan ASEAN. Oleh karena itu, perlu penguatan pilar daya saing negara dan daerah pada berbagai bidang, sektor, program, dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, serta penataan dan revitalisasi fungsi kelembagaan sebagai agenda prioritas terutama pada lima pilar daya saing Indonesia yang peringkatnya terendah di antara 148 negara, yaitu efisiensi pasar tenaga kerja (110), kesiapan teknologi (77), pendidikan dasar dan kesehatan (74), infrastruktur (56), dan kelembagaan (53).

Kata Kunci: *Snapshot*, Daya Sain Indonesia, MEA

PENDAHULUAN

Salah satu artikel yang dibahas dalam Seminar Sehari bertema “Urgensi Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara (PHPN) Dalam Meningkatkan Kinerja



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Lembaga Negara” yang disponsori oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Hotel Clarion (Universitas Negeri Makassar, 5 November 2015) adalah Artikulasi Fungsi Kelembagaan Dalam Mendukung Daya Saing Daerah Menghadapi MEA 2015 (Akib, 2015). Artikulasi, atau lebih tegas adalah “penataan dan revitalisasi” fungsi kelembagaan merupakan wujud reformasi salah satu pilar daya saing internasional negara-negara di dunia (*Global Competitiveness Report* tahun 2014-2015, dalam Schwab, 2015). Menurut Haris (2012) bahwa kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara bangsa. Salah satu bentuk kelembagaan (institusi birokrasi) negara yang berwenang mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan lembaga (institusi) demokrasi khas Indonesia, sebagai penjelmaan seluruh rakyat. MPR merupakan lembaga formal yang bertanggungjawab untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan menciptakan *cheks and balances* di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Penjelasan UUD Republik Indonesia 1945).

Guna merealisasikan tanggung jawab lembaga tinggi Negara dalam meningkatkan daya saing bangsa, maka dibuat pedoman (haluan) yang mampu menunjukkan arah dan tujuan yang akan dicapai. Pedoman dimaksud adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara, disingkat GBHN (Orde Baru), sebagai penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. GBHN “pernah” dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tugas pokok, fungsi dan peran lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah, namun sejak GBHN yang merupakan produk MPR itu diganti menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) pada era reformasi saat ini, ternyata – menurut sejumlah orang – belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945, tentang tujuan negara. Demikian pula, hingga saat ini daya saing nasional dan daerah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, salah satu cara tepat yang dilakukan adalah mengartikulasi dan atau merevitalisasi fungsi kelembagaan, termasuk revitalisasi fungsi MPR-RI dalam mendukung daya saing nasional pada era *ASEAN Economic Community (AEC)* saat ini.

Tanpa mengabaikan adanya beragam indikator daya saing internasional bagi suatu negara, maka penguatan fungsi kelembagaan dalam rangka membangun daya saing nasional dan daerah (provinsi, kabupaten atau kota) di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Mengacu pada kata kunci pertanyaan dari Rudyard Kipling (1865-1936), dengan formula 5W+1H (*what, why, when, where, who, dan how*), artikel ini bertujuan untuk menjelaskan *snapshot* daya saing nasional dan daerah di Indonesia dalam memasuki era AEC.

Pertama, *What*, apa yang dimaksud daya saing. Konsep daya saing merupakan isu utama dalam wacana pembangunan setiap bangsa/negara. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu institusi (organisasi), kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki secara berkelanjutan (Porter, 2000; Akib, 2008). Konsep daya saing negara menurut *European Commission* adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan pasar internasional (global) yang diiringi dengan kemampuan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

mempertahankan tingkat pendapatan yang tinggi secara berkelanjutan, atau kemampuan daerah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja, serta kemampuan meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat di dalamnya (*European Commission*, 1999 h. 4, dalam Gardiner, Martin dan Tyler, 2004; Huggins (2007) dalam *UK Competitiveness Index*). Makna daya saing kelembagaan secara tersirat adalah kondisi perekonomian yang kondusif berbasis fungsi kelembagaan (institusi birokrasi) yang kuat sebagai prasyarat bagi suatu negara atau daerah untuk berkembang. Daya saing merupakan kata kunci yang melekat dalam konsep pembangunan ekonomi lokal/daerah. Camagni (2002) menyatakan bahwa daya saing daerah merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta bagi keberlanjutan usaha peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah saat ini.

Menghadapi globalisasi ekonomi yang bercirikan persaingan bebas maka suatu masyarakat atau daerah hanya akan eksis atau bertahan apabila mempunyai daya saing yang tinggi (Halwani, 2002: 423). Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul baik secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional, antar-daerah, atau pada skala internasional, antar negara. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai pada implementasi dan evaluasinya berbasis fungsi kelembagaan dan tata kelola yang handal, serta pembangunan infrastruktur pendukungnya. Muara dari evaluasi implementasi kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada skala perekonomian daerah dan nasional.

Semakin kompetitif sebuah sistem perekonomian, maka pembangunannya pun akan tumbuh lebih cepat. *Global Competitive Report 2000*, *World Competitiveness Report* dan *Institute for Management Development (IMD)* menerbitkan daftar peringkat daya saing internasional negara-negara di dunia. Indeks daya saing negara dihitung atas dasar sembilan (9) kelompok karakteristik struktural ekonomi yang meliputi: keterbukaan terhadap perdagangan dan keuangan internasional; peran kebijakan fiskal dan regulasi pemerintah; birokrasi yang efisien; pembangunan pasar finansial; kualitas infrastruktur; kualitas teknologi; kualitas manajemen bisnis; fleksibilitas pasar tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia (SDM); serta kualitas kelembagaan, hukum, dan politik. Sementara itu, menurut *Institute for Management Development/ IMD* (2014) bahwa indikator daya saing Negara terdiri dari empat (4) aspek, yaitu: 1) kinerja perekonomian, 2) efisiensi pemerintah, 3) efisiensi dunia usaha, dan 4) infrastruktur. Penjabaran dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 1.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Tabel 1. Indikator Daya Saing Negara menurut *Institute for Management Development*

Kinerja Perekonomian
Terdiri dari 83 kriteria, mencakup: Ekonomi Domestik, Perdagangan Internasional, Investasi Internasional, tenaga kerja, dan harga.
Efisiensi Pemerintah
Terdiri dari 70 kriteria, mencakup: Keuangan Publik, Kebijakan Fiskal, Kerangka Kerja Institusional, Peraturan perundangan dunia usaha, dan kerangka kerja masyarakat
Efisiensi Dunia Usaha
Terdiri dari 71 kriteria, mencakup: Produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktek manajemen, serta perilaku dan nilai-nilai.
Infrastruktur
Terdiri dari 114 kriteria, mencakup: infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmu pengetahuan, kesehatan, serta lingkungan dan pendidikan

Menurut *Global Competitiveness Report/GCR* tahun 2014-2015 bahwa, indikator daya saing negara/daerah terdiri dari 12 pilar, yakni: 1) kelembagaan, 2) infrastruktur, 3) stabilitas ekonomi makro, 4) kesehatan dan pendidikan dasar, 5) pendidikan tinggi dan pelatihan, 6) efisiensi pasar barang dan jasa, 7) efisiensi pasar tenaga kerja, 8) kecanggihan pasar keuangan, 9) kesiapan teknologi, 10) luas pasar domestik, 11) kecanggihan bisnis, dan 12) inovasi. Sementara itu, menurut *European Commission* yang dirangkum dalam *regional Competitiveness Index (RCI)* bahwa indikator daya saing Negara terdiri dari 11 pilar, yaitu: 1) Institusi, 2) Stabilitas Makro-ekonomi, 3) Infrastruktur, 4) Kesehatan, 5) Pendidikan Dasar, 6) Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Seumur Hidup, 7) Efisiensi Pasar Tenaga, 8) Luas Pasar, 9) Ketersediaan Teknologi, 10) Kemudahan Usaha, dan 11) Inovasi. Singkatnya, kelembagaan (institusi birokrasi) yang kuat merupakan salah satu syarat bagi daya saing daerah dan nasional di Indonesia.

Kedua, *Why*, mengapa daya saing negara perlu dibangun dan ditingkatkan pada era AEC. Jawabannya, karena daya saing negara yang kuat secara keseluruhan menjadi pilar dan ujung tombak daya saing nasional, serta akan menjadi faktor terpenting bagi Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Berdasarkan penilaian *World Economic Forum (WEF)*, selama periode 2012-2014, peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Index (GCI)* mengalami peningkatan,



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

meskipun posisinya masih berada di bawah negara tetangga, seperti digambarkan pada tabel 2.

Tabel 2. Peringkat Indonesia dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*

No	Negara	Peringkat Dunia		
		2012 (144 negara)	2013 (148 negara)	2014 (144 negara)
1	Singapura	2	2	2
2	Malaysia	25	24	20
3	Brunei Darussalam	28	26	Tidak dilakukan penilaian
4	Thailand	38	37	31
5	Indonesia	50	38	34
6	Vietnam	75	70	68

Selanjutnya, menurut *Institute for Management Development (IMD)*, dalam *The World Competitiveness Year book* yang diterbitkannya, bahwa posisi daya saing Indonesia jauh di bawah Singapura dan Malaysia, seperti terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Peringkat Indonesia dalam *The World Competitiveness Yearbook*

No.	Negara	Peringkat Dunia		
		2012 (59 negara)	2013 (60 negara)	2014 (60 negara)
1	Singapura	4	5	3
2	Malaysia	14	15	12
3	Indonesia	42	39	37

Berdasarkan laporan *World Economic Index*, terpuruknya daya saing Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menonjol, antara lain: tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan; lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas; rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan; dan lemahnya iklim persaingan usaha. Sementara itu, menurut catatan IMD bahwa rendahnya kondisi daya saing kelembagaan di Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam empat (4) hal pokok, yaitu:

1. Buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di bidang perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, stabilitas harga.
2. Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himnunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.

3. Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
4. Keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik dan teknologi, serta infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan layanan publik dasar (seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat).

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 dinyatakan bahwa peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan negara secara nasional, merupakan modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya sangat bergantung pada kemampuan yang dimiliki dalam melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saingnya, serta dalam melakukan penataan dan penguatan fungsi kelembagaan.

Ketiga, *When*, kapan daya saing negara perlu dibangun dan ditingkatkan. Sejatinya, indikator daya saing negara dan daerah dibutuhkan sejak dulu, sekarang, dan di masa akan datang, namun dimensi waktu (kapan) diperlukan penguatan kembali indikator daya saing negara dan daerah-daerah di semua bidang, sektor, dan kegiatan pembangunan semakin terasa urgensi dan signifikansinya saat ini, karena Indonesia termasuk dalam kerjasama AEC yang dimulai pada bulan Desember tahun 2015 lalu.

Keempat, *Where*, dimana lokus yang tepat bagi penguatan indikator daya saing negara. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan otonomi daerah di Indonesia diletakkan pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa level analisis penguatan kembali indikator daya saing negara bukan hanya pada tingkat nasional dan provinsi, melainkan perlu diturunkan level analisisnya pada tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan level (lokus) daerah otonom yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 22/1999 dan 32/2004; 23/2014; 9/2015), bahkan sampai pada unit-unit pemerintahan yang terendah (kecamatan, kelurahan/desa) di masyarakat, sebagai lokus (area) pengembangan daya saing berbasis kompetensi lokal yang dimiliki.

Kelima, *Who*, siapa saja aktor (individu, institusi) yang berkepentingan terhadap penguatan dan peningkatan daya saing negara pada era AEC. Selama ini, atau pada era pemerintahan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), aktor (birokrat) yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara (pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat) terfokus pada aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas pembangunan nasional yang meliputi bidang: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan;



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Di samping itu, aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi negara pada tiga bidang prioritas pembangunan lainnya, yaitu kesejahteraan rakyat; politik, hukum, keamanan; serta perekonomian. Saat ini dan di masa akan datang, tentu saja diharapkan selain melibatkan aktor-aktor pada lokus dan fokus kelembagaan publik di atas, juga semakin melibatkan (kemitraan yang kolaboratif) pemangku kepentingan pada semua jenis, level dan elemen masyarakat madani, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara anggota AEC.

Keenam, *How*, bagaimana cara (upaya) membangun, mempertahankan, dan meningkatkan daya saing negara atau daerah kabupaten-kota di Indonesia. Salah satu caranya adalah melakukan penataan dan revitalisasi fungsi dan peran kelembagaan (institusi birokrasi) di berbagai bidang, sektor dan kegiatan, sebagai salah satu pilar daya saing menurut *Global Competitiveness Report* tahun 2014-2015 dan RCI) yang meliputi kewenangan pada institusi publik dan privat. Penataan kelembagaan (*institutional arrangement*) tersebut penting, karena kelembagaan memainkan peran aktif dalam proses politik di berbagai negara (Thaha, 2012). Kelembagaan menggunakan banyak aktifitas, seperti usaha penting berupa implementasi kebijakan (Undang-Undang dan peraturan), persiapan proposal legislatif, regulasi ekonomi, lisensi dalam perekonomian dan masalah profesional, serta membagi pelayanan kesejahteraan (Herbert M. Levine, dalam Aisyah, 2003).

Urgensi fungsi dan peran kelembagaan yang dapat mencapai tujuan negara dijelaskan oleh Widodo (2001: 80) bahwa kelembagaan publik dalam era sekarang ini harus dapat bekerja secara efisien, efektif, kompetitif, responsif, dan adaptif. Selain itu, kelembagaan publik harus mempunyai struktur dan prosedur yang fleksibel, serta harus mempunyai kemauan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan situasi dinamis dan ketidakpastian lingkungan di (tingkat) pusat dan daerah. Sedangkan pendekatan lain yang dapat digunakan dalam penataan kelembagaan (institusi birokrasi) adalah *institutional building* (organisasi), *capacity building* (SDM), atau menurut Akib (2011) melalui transformasi organisasi dengan pendekatan 5-R – *Reinspiring, Renewing, Reframing, Restructuring, Revitalizing* secara simultan pada berbagai lokus dan fokus organisasi publik dan private secara formal dan nonformal yang mendukung daya saing nasional dan daerah di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan jawaban pertanyaan 5W+1H tentang *snapshot* daya saing nasional dan daerah dalam memasuki era AEC, dapat dibuat suatu agenda prioritas terutama pada lima lokus dan fokus pilar daya saing Indonesia yang peringkatnya terendah di antara 148 negara, yaitu efisiensi pasar tenaga kerja (110), kesiapan teknologi (77), pendidikan dasar dan kesehatan (74), infrastruktur (56), dan kelembagaan (53). Upaya tersebut perlu dilakukan karena kerjasama masyarakat ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi sebagai suatu



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. Era AEC yang mulai diberlakukan pada bulan Desember 2015 bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya. Rekomendasi agenda prioritas tersebut perlu didukung dengan penataan dan revitalisasi fungsi kelembagaan sebagai instrumen dan wahana yang menyatukan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah dengan agenda prioritas pembangunan Presiden-Wakil Presiden (Bapak Ir. Joko Widodo bersama Bapak Drs. Muhammad Jusuf Kalla) yang akan mereaktualisasi semangat “Nawa Cita” dan “Tri Sakti”, yaitu berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Dara, 2003. *Hubungan Birokrasi dengan Demokrasi*, <http://library.usu.ac.id/download/fisip/admnegara-aisyah.pdf>, Usu Digital Library, Diakses tanggal 30 November 2008.
- Akib, Haedar. “Strategi Pengembangan Inovasi Berbasis Kompetensi Lokal,” *Jurnal Administrasi Negara*, STIA LAN Makassar, 2008.
- _____. “Mencermati Heuristik Transformasi organisasi: Merektualisasi Perilaku Kreatif Manusia Melalui Pendekatan *Knowledge Management*”. *Jurnal Manajemen USAHAWAN Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, Vol. XXXVIII, Mei-Juni 2011.
- _____. “Artikulasi Fungsi Kelembagaan Dalam mendukung Daya Saing Daerah Menghadapi Era MEA 2015”, makalah pada Seminar Sehari bertema “Urgensi Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara (PHPN) Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Negara” yang disponsori oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Hotel Clarion Makassar, 5 November 2015.
- Camagni, R., 2002. *On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?* .ERSA conference papers ersa02p518, European Regional Science Association
- European Commission. 2013. *EU Regional Competitiveness Index*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Gardiner, B., Martin, R., Tyler, p., 2004. *Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions*. University of Cambridge, Cambridge
- Halwani, R Hendra. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Haris (2012). Kelembagaan, (online) <http://harissetiana.blogspot.co.id/2012/09/.html>, diakses 3 November 2015)
- Huggins, Robert. 2006. “The UK Competitiveness Index 2006-2007 ”. Sheffield: Robert Huggins Associates.
- Institute for Management Development. 2014. *The World Competitiveness Yearbook* IMD World Competitiveness Center. Switzerland.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

- Michael E Porter, 2000, Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan pesaing, Terjemahan, Agus Maulana, Liberty, Yogyakarta.
- Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2011. *Reformasi kelembagaan Pemerintah daerah*. Workshop Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Daerah.
- Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan Keuangan. 2014. *Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka Kesejahteraan Masyarakat*.
- Schwab, Kalus. 2015. *The Global Competitiveness Report 2014-2015*.
- Sunarno. 2008. *Redefinisi sankri dan penguatan SANKRI untuk pembangunan aparatur negara*. Seminar Nasional Pembangunan Aparatur Negara.
- Thaha Rasyid. 2012. *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanudin.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, www.bappenas.go.id/files/5913/5028/5428/uud-1945.doc, diakses 12 Maret 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Smith, Alwi and Haedar Akib. “The Effectiveness of Trash Management Implementation in Ambon, Maluku (The Influence of Socialization, Coordination and Control to the Effectiveness of Trash Management)” *International Journal of Public Administration*, Volume 38, Issue 10, 2015. Routledge Taylor & Francis Group. DOI:10.1080/01900692.2014.908214. Published online: 15 Jul 2015.
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.